



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp. (0756) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 99 /Kpts/DKPS-PS/2025

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala,



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/40/kpts/DKPS-PS/2025
 TANGGAL : 7 Januari 2025
 TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai RB Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	B
	2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	-	-	100	100	80	81
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82	84	91	92	93
	2. Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	-	-	80	100	93	94

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100	100	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)
2. Terwujudnya Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Jumlah Inovasi Kepegawaian	-	-	1	1	-	-
	2. Jumlah Inovasi PIAK	-	-	-	-	1	1

	3. Jumlah Inovasi Pencatatan Sipil	-	-	-	-	1	1
	4. Jumlah Inovasi Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	1	1
3. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			75%	78%	88%	82%
	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			95%	96%	98%	98,5%
4. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	1. Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan yang disajikan	-	-	100%	100%	-	-
	2. Persentase Sarana Pengolah Data Dalam Kondisi Baik	-	-	75%	78%	80%	82%
	3. Persentase Jenis Data Kependudukan yang disajikan	-	-	-	-	100%	100%
	4. Persentase OPD yang melakukan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	-	57%	76 %
	5. Persentase Mitra yang melakukan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	-	30%	40%
5. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Adminduk	1. Persentase Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat	-	82%	84%	91 %	92 %	93 %

KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	5	4	2	2	2	2
	2. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	11	8	8	8	8	8
2. Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kepegawaian dengan Optimal	1. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	9.000	9.500	9.800	10.000	10.500	10.800
	2. Jumlah penerbitan Akta Perkawinan			2	4	4	4
	3. Jumlah penerbitan Akta Perkawinan			2	4	4	4
	4. Jumlah penerbitan akta kematian	3.500	4.000	4.200	4.500	4.900	5.200
	5. Jumlah Penerbitan KTP el	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	6. Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak	10.000	24.000	31.500	36.000	40.000	44.000
	7. Jumlah penerbitan Kartu Keluarga	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000	57.000
	8. Jumlah Perekaman KTP el			9.000	9.526	9.968	1.137

4. Tersedianya Penyajian Data Kependudukan	1. Jumlah jenis data agregat kependudukan yang disajikan	4	4	4	4	-	-
	2. Jumlah sarana pengolah data dalam kondisi baik	15	15	15	15	-	-
	3. Jumlah Jenis Data Kependudukan yang disajikan					4	4
	4. Jumlah OPD yang melakukan Perjanjian Kerja Sama					15 PKS	20 PKS
	5. Jumlah Mitra yang melakukan Perjanjian Kerja Sama					5 PKS	10 PKS
5. Jumlah Laporan SKM yang disusun	1. Jumlah Laporan Survei IKM	-	1	1	1	1	1

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Inspektorat
Penanggung jawab	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
Formulasi	:	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Sumber data	:	Survey data primer (kuesioner)
Penanggung jawab	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Cakupan Layanan Adminduk

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan meliputi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan akta- akta pencatatan sipil
Formulasi	:	$\frac{\% \text{ Capaian Perekaman KTP-el} + \% \text{ Capaian Penerbitan KK} + \% \text{ Capaian Penerbitan KIA} + \% \text{ Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun} + \% \text{ Capaian Penerbitan Akta Kematian}}{5}$

Sumber data	:	Data Konsolidasi Bersih SIAK Kemendagri
Penanggung jawab	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Jumlah Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh sekretaris.
- Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus di sampaikan}} \times 100\%$

- Sumber data : Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
- Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah bidang}}$

- Sumber data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
- Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Seluruh Kepala Bidang.

7. Skor kepuasan Masyarakat

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Skor Kepuasan Masyarakat merupakan nilai kinerja penyelenggara pelayanan public. Untuk mengukur apakah terjadi peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan dapat dihitung dari perbandingan SKM dari tahun sebelumnya;
- Formulasi :
$$\frac{\text{SKM Tahun Ini (n+1)}}{\text{SKM Tahun Lalu (n-1)}}$$
- Sumber data : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Seluruh Kepala Bidang

8. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk meliputi kepemilikan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Perekaman KTP_el, Pencetakan KTP_el
- Formulasi :
$$\frac{\% \text{ Capaian Perekaman KTP_el} + \% \text{ Capaian Penerbitan KK} + \% \text{ Capaian Penerbitan KIA} + \% \text{ Pencetakan KTP_el}}{4}$$
- Sumber data : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penanggungjawab : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

9. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Persentase kepemilikan dokumen berupa akta – akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kematian
- Formulasi :
$$\frac{\% \text{ Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun} + \% \text{ Capaian Penerbitan Akta Kematian} + \% \text{ Capaian Penerbitan Akta Perkawinan} + \% \text{ persentase penerbitan akta perceraian}}{4}$$
- Sumber data : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Penanggungjawab : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

10. Persentase Sarana Pengolah Data Dalam Kondisi Baik

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah sarana tempat layanan pengolah data kependudukan yang dipelihara dibagi dengan jumlah sarana pengolah ada yang ada

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah sarana pengolah data yang diperbaiki}}{\text{Jumlah sarana pengolah data}} \times 100\%$$

Sumber data : Bidang PIAK PD.

Penanggung jawab : Kepala Bidang Bidang PIAK PD.

11. Persentase Jenis Data Kependudukan yang disajikan

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah jenis data agregat kependudukan yang disajikan berdasarkan data Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Semester dalam satu tahun disajikan dua kali.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah jenis data agregat kependudukan yang disajikan}}{\text{Jumlah jenis data agregat kependudukan}} \times 100\%$$

Sumber data : Data DKB per semester dari Kementerian Dalam Negeri.

Penanggung jawab : Kepala Bidang Bidang PIAK PD.

12. Persentase OPD yang melakukan Perjanjian Kerja Sama

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah Jumlah OPD yang melakukan perjanjian kerja tentang pemanfaatan data kependudukan sama selama RPJMD.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah OPD yang melakukan kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Sumber data : Dokumen PKS dengan OPD.

Penanggung jawab : Kepala Bidang Bidang PIAK PD.

13. Persentase Mitra yang melakukan Perjanjian Kerja Sama

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah mitra yang melakukan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan data kependudukan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Mitra yang melakukan kerja sama}}{\text{Jumlah jenis data}} \times 100\%$$

kependudukan

Sumber data : Dokumen PKS dengan mitra.
Penanggung jawab : Kepala Bidang Bidang PIAK PD.

14. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Dukcapil
Penanggung jawab : Kepala sub bagian umum dan kepegawaian.

15. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Formulasi : Jumlah Dokumen
Sumber data : Bagian Perencanaan
Penanggung jawab : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

16. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Formulasi : Jumlah Dokumen
Sumber data : Bagian Perencanaan
Penanggung jawab : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

17. Jumlah laporan Inovasi Pendaftaran Penduduk

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan Inovasi yang diterbitkan pada bidang pendaftaran penduduk

Formulasi : Jumlah Inovasi Pendaftaran penduduk
Sumber data : Bagian Pendaftaran Penduduk
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

18. Jumlah kartu inventaris ruangan yang diterbitkan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

DefinisiOperasional : Kartu Inventaris Ruangan yang dibuat oleh pengurus barang yang menggambarkan nama barang, jumlah merek, bahan tahun pembuatan, harga beli satuan dan kondisi barang

Formulasi : Jumlah kartu inventaris yang diterbitkan

Sumber data : Bagian pengurus barang

Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

19. Jumlah laporan barang persediaan dan belanja yang diterbitkan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

DefinisiOperasional : Merupakan laporan persediaan dan belanja barang yang dibuat dan dilaporkan oleh pengurus barang

Formulasi : Jumlah laporan barang persediaan dan belanja yang diterbitkan

Sumber data : Bagian pengurus barang

Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

20. Jumlah rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan ke DPKPAD

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

DefinisiOperasional : Merupakan penyampaian laporan barang milik daerah ke DPKPAD

Formulasi : Jumlah laporan barang milik daerah yang dilaporkan ke DPKPAD

Sumber data : Bagian pengurus barang

Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

21. Jumlah RKBMD dan RKPBMMD yang disampaikan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

DefinisiOperasional : Merupakan Rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) yang disampaikan ke DPKPAD untuk tahun yang akan datang

Formulasi : Jumlah RKBMD dan RKPBMMD yang dilaporkan ke DPKPAD

Sumber data : Bagian pengurus barang

Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

22. Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diarsipkan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

DefinisiOperasional : Merupakan dokumen surat masuk dan surat keluar yang dikelola dan diarsipkan dengan baik

Formulasi : Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diarsipkan

Sumber data : Bagian Pengolah data informasi

Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

23. Jumlah surat izin cuti yang di arsipkan

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- DefinisiOperasional : Merupakan dokumen surat izin cuti yang dikelola dan diarsipkan dengan baik
- Formulasi : Jumlah Surat izin cuti yang diarsipkan dalam satu tahun
- Sumber data : Bagian Pengolah data informasi
- Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

24. Jumlah Surat Rekomendasi kenaikan pangkat ASN

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- DefinisiOperasional : Merupakan dokumen surat rekomendasi kenaikan pangkat ASN yang diterbitkan
- Formulasi : Jumlah Surat rekomendasi kenaikan pangkat ASN yang diterbitkan dalam satu tahun
- Sumber data : Bagian Pengolah data informasi
- Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

25. Jumlah SK Berkala ASN yang diterbitkan

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- DefinisiOperasional : Merupakan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Berkala ASN yang diterbitkan untuk kenaikan gaji ASN
- Formulasi : Jumlah SK berkala ASN yang diterbitkan dalam satu tahun
- Sumber data : Bagian Pengolah data informasi
- Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

26. Jumlah SK Kepala Dinas yang di Terbitkan

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- DefinisiOperasional : Merupakan Surat Keputusan Kepala Dinas yang diterbitkan untuk menunjang kelancaran Kinerja Dinas.
- Formulasi : Jumlah SK yang diterbitkan dalam satu tahun
- Sumber data : Bagian Pengolah data informasi
- Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian

27. Jumlah SPP UP/GU/TU dan LS yang diterbitkan

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- DefinisiOperasional : Merupakan SPP UP/GU/TU dan LS yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran
- Formulasi : Jumlah SPP UP/GU/TU dan LS yang diterbitkan dalam satu tahun
- Sumber data : Penelaah teknis kebijakan/Bendahara Pengeluaran
- Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

28. Jumlah SPM UP/GU/TU/ dan LS yang diurus

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- DefinisiOperasional : Merupakan SPM UP/GU/TU/ dan LS yang

Formulasi : dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran
: Jumlah SPM UP/GU/TU/ dan LS yang
diterbitkan dalam satu tahun
Sumber data : Penelaah teknis kebijakan/Bendahara
Pengeluaran
Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan
Pelaporan

29. Jumlah Tagihan/SPJ yang dibayar melalui NCM
Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan Tagihan/SPJ yang dibayar melalui
NCM oleh bendahara pengeluaran
Formulasi : Jumlah Tagihan/SPJ yang dibayar melalui NCM
dalam satu tahun
Sumber data : Penelaah teknis kebijakan/Bendahara
Pengeluaran
Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan
Pelaporan

30. Jumlah SP2D UP/GU/TU/ dan LS yang dibukukan
Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan SP2D UP/GU/TU/ dan LS yang
dibukukan oleh bendahara pengeluaran
Formulasi : Jumlah SP2D UP/GU/TU/ dan LS yang
dibukukan dalam satu tahun
Sumber data : Penelaah teknis kebijakan/Bendahara
Pengeluaran
Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan
Pelaporan

31. Jumlah e-billing Pajak yang dipungut dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah
Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan e-billing Pajak yang dipungut dan
disetorkan ke Kas Negara/Daerah oleh
bendahara pengeluaran
Formulasi : Jumlah e-billing Pajak yang dipungut dan
disetorkan ke Kas Negara/Daerah dalam satu
tahun
Sumber data : Penelaah teknis kebijakan/Bendahara
Pengeluaran
Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan
Pelaporan

32. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan ke Bendahara Umum
Daerah
Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan Laporan Pertanggungjawaban yang
disampaikan ke Bendahara Umum Daerah
Formulasi : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang
disampaikan ke Bendahara Umum Daerah
dalam satu tahun

Sumber data : Penelaah teknis kebijakan/Bendahara Pengeluaran
Penanggungjawab : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

33. Jumlah laporan Layanan Penerbitan dokumen bagi penduduk rentan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
DefinisiOperasional : Merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan untuk penduduk rentan bencana alam.
Formulasi : Jumlah Dokumen yang diterbitkan
Sumber data : Bagian Pendaftaran Penduduk
Penanggungjawab : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

34. Jumlah Laporan Inovasi Pendaftaran Penduduk

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
DefinisiOperasional : Merupakan jumlah Inovasi pendaftaran penduduk pada tahun berjalan
Formulasi : Jumlah laporan inovasi pendaftaran penduduk
Sumber data : Penelaah teknis kebijakan
Penanggungjawab : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

35. Jumlah layanan penerbitan kartu keluarga

Level dalamRenstra : Kinerja Operasional
DefinisiOperasi onal : Merupakan dokumen Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan di Dinas dan Unit Kerja Layanan dalam satu tahun.
Formulasi : Dokumen
Sumber data : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

36. Jumlah layanan perekaman KTP el

Level dalamRenstra : Kinerja Operasional
DefinisiOperasi onal : Jumlah Perekaman KTP el yang dilakukan di Dinas dan Unit Kerja Layanan dalam satu tahun.
Formulasi : Jumlah orang yang melakukan perekaman dalam satu tahun
Sumber data : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

37. Jumlah Layanan penerbitan KIA

Level dalamRenstra : Kinerja Operasional
DefinisiOperasi onal : Merupakan Jumlah dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan di Dinas dan Unit Kerja Layanan dalam satu tahun.
Formulasi : Dokumen

Sumber data : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

38. Jumlah layanan surat pindah datang

Level dalamRenstra : Kinerja Operasional

dalamRenstra

DefinisiOperasi : Merupakan Jumlahsurat pindah datang yang diterbitkan di
onal Dinas dan Unit Kerja Layanan dalam satu tahun.

Formulasi : Dokumen

Sumber data : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Penanggung jawab : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

39. Jumlah layanan penerbitan akta kelahiran

Level dalamRenstra : Kinerja Operasional

dalamRenstra

DefinisiOperasi : Merupakan Jumlah dokumen Akta Kelahiran yang
onal diterbitkan di Dinas dan Unit Kerja Layanan dalam satu tahun.

Formulasi : Dokumen

Sumber data : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Penanggung jawab : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

40. Jumlah layanan penerbitan akta kematian

Level dalamRenstra : Kinerja Operasional

dalamRenstra

DefinisiOperasi : Merupakan Jumlah dokumen Akta Kematian yang
onal diterbitkan di Dinas dan Unit Kerja Layanan dalam satu tahun.

Formulasi : Dokumen

Sumber data : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Penanggung jawab : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

41. Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan

Level dalamRenstra : Kinerja Operasional

DefinisiOperasional : Jumlah dokumen Akta Perkawinan Non Muslim
yang diterbitkan setiap tahunnya

Formulasi : Jumlah Akta Perkawinan Non Muslim yang
diterbitkan pada tahun berjalan

Sumber data : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Penanggungjawab : Pejabat Fungsional Analis Kebijakan

42. Jumlah Penerbitan Akta perceraian

Level dalamRenstra : Kinerja Operasional

DefinisiOperasional : Jumlah dokumen Akta Perceraian Non Muslim
yang diterbitkan setiap tahunnya

Formulasi : Jumlah Akta Perceraian Non Muslim yang

diterbitkan pada tahun berjalan
Sumber data : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Penanggungjawab : Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan

43. Jumlah jenis data agregat kependudukan yang disajikan

Level : Kinerja Operasional
dalam Renstra
Definisi Operasional : Merupakan jumlah jenis data agregat kependudukan berupa buku profil kependudukan dan buku agregat kependudukan yang disajikan dua kali dalam setahun sehingga jumlah jenis data agregat kependudukan yang disajikan dalam setahun sebanyak 4 dokumen
Formulasi : Dokumen
Sumber data : Bidang PIAK PD
Penanggungjawab : Kepala Bidang PIAK PD

44. Jumlah sarana pengolahan data dalam kondisi baik

Level : Kinerja Operasional
dalam Renstra
Definisi Operasional : Merupakan jumlah sarana pengolahan data berupa PC dan jaringan yang ada di Dinas dan unit kerja layanan
Formulasi : Jaringan SIAK
Sumber data : Bidang PIAK PD
Penanggungjawab : Kepala Bidang PIAK PD

45. Jumlah Laporan SKM yang disusun

Level : Kinerja Operasional
dalam Renstra
Definisi Operasional : Setelah dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat, dengan jumlah sampel tertentu, kemudian data tersebut diolah dan dijadikan sebuah laporan dalam bentuk buku
Formulasi : Dokumen
Sumber data : Sekretariat
Penanggungjawab : Sekretaris Dinas dan seluruh kepala Bidang

KEPALA DINAS,



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001